

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**



MATA KULIAH	:	Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pemerintahan*
KODE MK	:	3PBIP307
SEMESTER	:	6

Tim Penyusun:

Balada Raf, S.Sos., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1					Kode Dokumen RPS-3PBIP307
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pemerintahan*		3PBIP307	MKPP	T=3	P=0	6	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK			Ketua PRODI	
		 Balada Raf, S.Sos., M.Si. NIDN. 0927076704	 Balada Raf, S.Sos., M.Si. NIDN. 0927076704			 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-01	Menunjukkan sikap religius, berintegritas, menjunjung Pancasila dan nilai kebangsaan, menaati etika pemerintahan dan prinsip antikorupsi, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam tim.					
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-04	Mampu menganalisis masalah publik, merumuskan alternatif kebijakan, serta mengevaluasi implementasi dan kinerja kebijakan publik secara berbasis bukti.					
	CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, landasan hukum, dan kerangka kelembagaan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan di Indonesia — mencakup tipologi pengawasan (internal, eksternal, masyarakat), hierarki regulasi (UU, PP, Perpres), serta peran BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman — sebagai fondasi analitis mata kuliah.					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis kelemahan dan celah pengawasan pada kasus nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law) dan prinsip					

		antikorupsi, dibuktikan dengan laporan analisis kasus tertulis minimal 2.000 kata yang mengidentifikasi akar masalah secara berbasis bukti.
	CPMK-3	Mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi mekanisme pengendalian internal pemerintah (SPIP — Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai PP 60/2008) pada satuan kerja pemerintah daerah, termasuk menilai efektivitas komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan, serta merumuskan temuan evaluatif dalam format matriks kinerja pengendalian yang terukur.
	CPMK-4	Mahasiswa mampu merancang instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi (e-audit, dashboard kinerja, sistem pelaporan pengaduan daring) yang akuntabel dan adaptif terhadap konteks kelembagaan pemerintah daerah, dibuktikan dengan produk rancangan berupa prototipe/blueprint instrumen pengawasan lengkap dengan spesifikasi teknis, indikator kinerja utama, dan mekanisme tindak lanjut temuan.
	CPMK-5	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan yang berintegritas, berpihak pada kepentingan publik, dan selaras nilai Pancasila — mencakup alternatif kebijakan, analisis kelayakan, dan strategi implementasi — dalam forum simulasi sidang kebijakan, dengan menampilkan sikap tanggung jawab profesional dan etika pemerintahan secara konsisten.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar, tipologi, dan landasan hukum sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan di Indonesia, serta memetakan hierarki regulasi (UU, PP, Perpres) yang mengatur pengawasan pemerintahan.
	Sub-CPMK2	Membandingkan peran, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar-lembaga pengawasan pemerintahan (BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman) sebagai kerangka kelembagaan pengawasan di Indonesia.
	Sub-CPMK3	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan celah serta kelemahan pengawasan pada kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law).
	Sub-CPMK4	Menganalisis akar masalah dan dampak kelemahan pengawasan pada kasus nyata pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan prinsip antikorupsi, dibuktikan dengan laporan analisis kasus tertulis minimal 2.000 kata.
	Sub-CPMK5	Mendeskrripsikan kerangka normatif dan komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP 60/2008, serta menjelaskan keterkaitan antar-komponen SPIP dalam siklus pengendalian pada satuan kerja pemerintah daerah.
	Sub-CPMK6	Mengevaluasi efektivitas implementasi komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan SPIP pada satuan kerja pemerintah daerah, serta merumuskan temuan evaluatif dalam format matriks kinerja pengendalian yang terukur.
	Sub-CPMK7	Menganalisis kebutuhan dan merancang arsitektur konseptual instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi (e-audit, dashboard kinerja, atau sistem pelaporan pengaduan daring) yang sesuai dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia.
	Sub-CPMK8	Mengembangkan prototipe atau blueprint lengkap instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi yang akuntabel dan adaptif, dilengkapi spesifikasi teknis, indikator kinerja utama (IKU), dan mekanisme tindak lanjut temuan.
	Sub-CPMK9	Merumuskan alternatif kebijakan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan beserta analisis kelayakan dan strategi implementasinya, dengan mempertimbangkan nilai integritas, kepentingan publik, dan nilai-nilai Pancasila.

	Sub-CPMK10	Mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan pemerintahan dalam forum simulasi sidang kebijakan dengan menampilkan argumentasi berbasis bukti, sikap tanggung jawab profesional, dan etika pemerintahan yang konsisten.					
		Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK					
		CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4	CPMK-5	
	Sub-CPMK1	√	—	—	—	—	
	Sub-CPMK2	√	—	—	—	—	
	Sub-CPMK3	—	√	—	—	—	
	Sub-CPMK4	—	√	—	—	—	
	Sub-CPMK5	—	—	√	—	—	
	Sub-CPMK6	—	—	√	—	—	
	Sub-CPMK7	—	—	—	√	—	
	Sub-CPMK8	—	—	—	√	—	
	Sub-CPMK9	—	—	—	—	√	
	Sub-CPMK10	—	—	—	—	√	
	Jumlah	2	2	2	2	2	
		Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK					
		CPL-01 (%)	CPL-03 (%)	CPL-04 (%)	CPL-05 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu
	Sub-CPMK1		13			13	2
	Sub-CPMK2		13			13	2
	Sub-CPMK3	5	4	4		13	2
	Sub-CPMK4	3	2	2		7	1
	Sub-CPMK5			7	6	13	2
	Sub-CPMK6			7	6	13	2
	Sub-CPMK7			4	3	7	1
	Sub-CPMK8			4	3	7	1
	Sub-CPMK9	3		2	2	7	1
	Sub-CPMK10	3		2	2	7	1

		14	32	32	22	100	15	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan (3 SKS) mengkaji secara komprehensif kerangka konseptual, landasan hukum, dan kelembagaan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan di Indonesia, meliputi tipologi pengawasan internal dan eksternal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP 60/2008, serta peran BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan negara. Mata kuliah ini berposisi sebagai mata kuliah analisis-terapan dalam kurikulum Ilmu Pemerintahan UNISAN yang mengintegrasikan CPL-01, CPL-03, CPL-04, dan CPL-05, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep melainkan juga mampu menganalisis kelemahan pengawasan pada kasus nyata pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka good governance dan prinsip antikorupsi. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan proyek (Case-Based Learning dan Project-Based Learning), mahasiswa secara progresif bergerak dari pemahaman kerangka regulasi, analisis celah pengawasan berbasis bukti, evaluasi efektivitas pengendalian internal, hingga perancangan instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi berupa prototipe atau blueprint dengan spesifikasi teknis dan indikator kinerja utama. Capaian integratif mata kuliah ini terwujud dalam forum simulasi sidang kebijakan di mana mahasiswa mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi penguatan sistem pengawasan yang berintegritas, berpihak pada kepentingan publik, serta mencerminkan nilai Pancasila dan etika pemerintahan sebagai perwujudan nilai Integrity dan Nationalism dalam karakter ICHSA-N.							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar pengawasan pemerintahan; 2. Landasan hukum & hierarki regulasi pengawasan; 3. Tipologi pengawasan: internal, eksternal, masyarakat; 4. Kelembagaan BPK, BPKP, Inspektorat, Ombudsman; 5. Kerangka good governance & prinsip antikorupsi; 6. Analisis kasus pengawasan pemerintah daerah & desa; 7. SPIP: komponen & implementasi PP 60/2008; 8. Evaluasi efektivitas pengendalian internal; 9. Matriks kinerja pengendalian satuan kerja; 10. Instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi; 11. Perancangan e-audit & dashboard kinerja pemerintah; 12. Rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan.							
Pustaka	Utama :	(1) Bovaird, T., & Löffler, E. (Eds.) (2016). Public Management and Governance. 3rd Edition. Routledge; (2) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013). Internal Control — Integrated Framework. COSO; (3) Robinson, M. (2015). From Old Public Administration to the New Public Service: Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. UNDP Global Centre for Public Service Excellence; (4) Sulistiyani, A. T. (2011). Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Gava Media; (5) Republik Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara; (6) Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara.						

		Pendukung : (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah. BPKP; (2) Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Survei Penilaian Integritas: Metodologi dan Hasil Nasional. KPK; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; (5) Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia: Pengawasan Pelayanan Publik dan Mal-administrasi. Ombudsman RI.					
Dosen Pengampu		Balada Raf, S.Sos., M.Si.					
Modalitas dan Matakuliah prasyarat		Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dasar, tipologi, dan landasan hukum sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan di Indonesia, serta memetakan hierarki regulasi (UU, PP, Perpres) yang mengatur pengawasan pemerintahan.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan pengertian pengawasan dan pengendalian pemerintahan beserta perbedaan konseptualnya secara tepat - Mengidentifikasi tipologi pengawasan (internal, eksternal, masyarakat) berdasarkan karakteristik dan fungsinya masing-	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat daring (5 soal pilihan ganda + 2 soal uraian pendek) yang menguji ketepatan definisi, perbedaan tipologi pengawasan, dan relevansinya dengan tata kelola pemerintahan; dinilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan konsep dasar pengawasan dan tipologi dengan metode ceramah interaktif menggunakan LCD proyektor, kemudian membuka sesi tanya-jawab terpandu untuk mengklarifikasi perbedaan konseptual antara pengawasan dan pengendalian (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah pengantar (15-20 menit) yang menjelaskan konsep dasar dan tipologi pengawasan pemerintahan ke LMS UNISAN, disertai slide interaktif dan tautan referensi regulasi daring (portal BPK, BPKP) (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: - Pengertian dan konsep dasar pengawasan dan pengendalian pemerintahan; - Tipologi pengawasan: internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; - Urgensi pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; - Keterkaitan pengawasan dengan	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		masing • Mendeskripsikan urgensi sistem pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Indonesia • Menghubungkan konsep pengawasan dengan prinsip good governance dalam konteks pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia	berdasarkan akurasi konsep dan kelengkapan penjelasan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan mengajukan pertanyaan atau tanggapan berbasis argumen yang relevan selama diskusi kelas; menunjukkan sikap jujur dan terbuka dalam menerima perspektif berbeda (mencerminkan nilai Integrity dan Harmony ICHSA-N) Tugas: Peta konsep (concept map) sistem	Mahasiswa membawa hasil bacaan mandiri dari pustaka utama, berpartisipasi dalam diskusi pleno kelas, dan mempresentasikan draft peta konsep secara berpasangan untuk mendapatkan umpan balik sejawat sebelum finalisasi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi kelompok kecil (3-4 orang) menganalisis ilustrasi kasus pengawasan pemerintahan daerah yang disiapkan dosen, mengidentifikasi jenis dan fungsi pengawasan yang terlibat, lalu memaparkan temuan di hadapan kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara mandiri menyusun peta konsep sistem pengawasan	Mahasiswa mengakses video dan slide di LMS UNISAN, membaca bab pengantar dari pustaka utama, kemudian menjawab kuis daring dan mengunggah peta konsep melalui fitur pengumpulan tugas LMS sebelum batas waktu yang ditetapkan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menelaah satu kasus ringkas mal-administrasi di pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia yang disediakan dosen di LMS, lalu mengidentifikasi tipologi pengawasan yang seharusnya berperan dalam kasus tersebut melalui forum diskusi daring	prinsip good governance; Pustaka: Bovaird & Löffler (2016); Robinson (2015); Sulistiyani (2011).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengawasan pemerintahan minimal mencakup 3 tipologi, 4 prinsip good governance, dan keterkaitannya; disajikan dalam 1 halaman A4 format digital (PDF/Canva)	pemerintahan yang memvisualisasikan hubungan antara konsep pengawasan, tipologi (internal, eksternal, masyarakat), dan prinsip-prinsip good governance. Peta konsep dilengkapi catatan singkat (maksimal 150 kata) yang menjelaskan relevansi sistem pengawasan bagi pemerintah daerah atau desa di Kawasan Timur Indonesia sebagai wujud orientasi nilai Service ICHSA-N. Deliverable: Satu file PDF atau Canva berisi peta konsep sistem pengawasan pemerintahan (1 halaman A4) beserta catatan penjelasan singkat (maksimal 150 kata), diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 2	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		
			Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tes/Unjuk Kerja: Kuis identifikasi regulasi (pencocokan pasal-substansi dan hierarki) yang mengukur kemampuan mahasiswa membedakan cakupan UU, PP, dan Perpres di bidang pengawasan; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi dan kelengkapan analisis hierarki Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi analitis dalam diskusi kelas mengenai celah atau tumpang-tindih regulasi	Dosen memfasilitasi sesi analisis regulasi berpandu menggunakan dokumen regulasi asli yang ditayangkan melalui LCD proyektor, menuntun mahasiswa mengurai hubungan hierarkis antar-regulasi dan membahas implikasi praktisnya bagi pengawasan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok (4-5 orang) masing-masing mendapat satu regulasi untuk dianalisis substansinya, kemudian setiap kelompok mempresentasikan analisis singkat di depan kelas untuk disatukan menjadi gambar hierarki regulasi yang utuh MP — Metode Pembelajaran:	Dosen mengunggah bahan bacaan regulasi utama (UU No. 15 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, Perpres No. 54 Tahun 2018) beserta panduan analisis hierarki ke LMS UNISAN, dilengkapi rekaman kuliah singkat (10-15 menit) yang mengurai struktur dan logika hierarki regulasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan membaca dokumen regulasi dari LMS, mengerjakan lembar kerja analisis hierarki regulasi secara mandiri, kemudian berpartisipasi dalam forum diskusi daring untuk mendiskusikan celah atau inkonsistensi regulasi yang ditemukan	• Hierarki regulasi pengawasan pemerintahan: UU, PP, dan Perpres; • Substansi pokok UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara; • Substansi pokok PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • Substansi PP No. 12 Tahun 2017 dan Perpres No. 54 Tahun 2018 dalam sistem pengawasan nasional; • Keterkaitan dan konsistensi antar-regulasi sebagai satu sistem hukum pengawasan; Pustaka: Republik Indonesia (2004); Republik Indonesia (2008);	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengawasan; menunjukkan sikap kritis berbasis data regulasi dan menghargai keberagaman perspektif hukum (nilai Harmony dan Nationalism ICHSA-N) Tugas: Diagram hierarki regulasi pengawasan pemerintahan beserta tabel ringkasan substansi tiap regulasi (maksimal 2 halaman A4), dikumpulkan sebagai kelanjutan dan pengembangan peta konsep Minggu 1	Case-Based Learning: setiap kelompok mengidentifikasi satu pasal krusial dari regulasi yang ditugaskan dan menjelaskan bagaimana pasal tersebut berkaitan dengan regulasi lain dalam hierarki pengawasan, dilanjutkan diskusi pleno untuk menyepakati peta hierarki bersama Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara mandiri menyusun diagram hierarki regulasi pengawasan pemerintahan Indonesia yang memuat UU No. 15 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, dan Perpres No. 54 Tahun 2018. Diagram dilengkapi tabel ringkasan yang memuat kolom: nama regulasi, objek pengaturan, subjek yang diatur, dan implikasi utama bagi	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa membandingkan ketentuan dua regulasi (misalnya PP No. 60 Tahun 2008 dan PP No. 12 Tahun 2017) melalui forum diskusi LMS, mengidentifikasi perbedaan ruang lingkup dan implikasinya bagi praktik pengawasan pemerintah daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Bovaird & Löffler (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengawasan. Tugas ini merupakan pengembangan langsung dari peta konsep Minggu 1, sehingga mahasiswa perlu menunjukkan keterkaitan antara tipologi pengawasan yang telah dipetakan dengan landasan regulasinya. Deliverable: Satu file PDF berisi diagram hierarki regulasi pengawasan (1 halaman) dan tabel ringkasan substansi regulasi (maksimal 1 halaman), total maksimal 2 halaman A4, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 3			
3,4	Sub-CPMK2: Membandingkan peran, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar-lembaga pengawasan pemerintahan (BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman) sebagai	Mahasiswa mampu: Mendeskripsikan dasar hukum, mandat, dan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat, dan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis komparasi kelembagaan (isian tabel perbandingan dasar hukum,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi panel simulasi: empat kelompok mahasiswa masing-masing memerankan satu lembaga (BPK, BPKP, Inspektorat, Ombudsman) dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah infografis perbandingan empat lembaga pengawasan dan tautan ke laporan resmi BPK, BPKP, dan Ombudsman RI di LMS UNISAN,	Bahan Kajian: - Dasar hukum, mandat, dan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara; - Peran BPKP sebagai pengawas intern	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kerangka kelembagaan pengawasan di Indonesia.	Ombudsman) secara tepat - Membandingkan perbedaan dan persamaan fungsi BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman berdasarkan objek pengawasan dan mekanisme kerjanya - Menganalisis celah koordinasi antar-lembaga pengawasan yang berpotensi menimbulkan tumpang-tindih atau kekosongan pengawasan dalam satu kasus nyata - Mengidentifikasi keterkaitan antara kelembagaan pengawasan dengan hierarki regulasi yang telah dipetakan pada Minggu 2	objek, dan mekanisme kerja empat lembaga) yang mengukur ketepatan dan kedalaman analisis perbandingan; dinilai berdasarkan kelengkapan atribut dan ketajaman analisis perbedaan Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam diskusi komparasi peran lembaga, termasuk kemampuan mengajukan argumen berbasis regulasi dan data laporan lembaga resmi; menunjukkan kejujuran akademik dalam	memaparkan mandat serta kewenangan lembaga mereka kepada kelas, diikuti sesi tanya-jawab antar-kelompok yang dipandu dosen (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempersiapkan bahan panel berdasarkan tabel komparasi yang telah dikerjakan secara daring, berpartisipasi aktif dalam sesi tanya-jawab antar-kelompok, dan mencatat poin-poin celah koordinasi yang teridentifikasi selama simulasi untuk digunakan pada Minggu 4 MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: setelah panel simulasi, diskusi pleno kelas menganalisis satu skenario tumpang-tindih kewenangan antar-	dilengkapi video kuliah (15 menit) yang mengurai perbedaan mandat dan mekanisme kerja tiap lembaga (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses infografis dan video di LMS, menelusuri situs resmi BPK, BPKP, Inspektorat daerah, dan Ombudsman RI untuk mengumpulkan data mandiri, kemudian mengisi lembar kerja tabel komparasi yang diunggah di LMS sebagai bahan pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa membaca satu ringkasan temuan audit BPK atau laporan Ombudsman yang disiapkan dosen,	pemerintah dan pembina SPIP; - Fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah; - Kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik dan mal-administrasi; - Mekanisme koordinasi dan potensi celah antar-lembaga pengawasan; Pustaka: Republik Indonesia (2004); Republik Indonesia (2008); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); Ombudsman Republik Indonesia (2022); Bovaird & Löffler (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			merujuk sumber (nilai Integrity ICHSA-N) Tugas: Tabel komparasi empat lembaga pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat, Ombudsman) yang memuat kolom dasar hukum, objek pengawasan, mekanisme kerja, dan hubungan koordinasi; maksimal 2 halaman A4 format Google Docs atau PDF	lembaga di pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia, mengidentifikasi akar masalah koordinasi berdasarkan regulasi yang telah dipelajari di Minggu 2 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara mandiri menyusun tabel komparasi empat lembaga pengawasan pemerintahan (BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman) yang memuat atribut: dasar hukum pembentukan, objek dan subjek pengawasan, mekanisme kerja, produk pengawasan (laporan/rekomendasi), dan pola hubungan koordinasi. Tabel dilengkapi paragraf analisis singkat (maksimal 200 kata) yang mengidentifikasi satu potensi celah koordinasi	mengidentifikasi lembaga mana yang berwenang dan bagaimana koordinasi seharusnya berjalan, lalu mendiskusikannya di forum LMS sebelum pertemuan luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				antar-lembaga dan menghubungkannya dengan regulasi terkait dari hierarki yang telah dipetakan pada Minggu 2. Deliverable: Satu file PDF berisi tabel komparasi empat lembaga pengawasan dan paragraf analisis celah koordinasi (total maksimal 2 halaman A4), diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 4			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis analisis kasus singkat (2 soal uraian) yang mengukur kemampuan mahasiswa mengaitkan prinsip good governance dengan praktik koordinasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi simulasi sidang mini kelembagaan: kelompok mahasiswa (dari peran lembaga yang dimainkan di Minggu 3) mendiskusikan kasus koordinasi yang sama, memaparkan posisi masing-masing lembaga, dan secara kolaboratif merumuskan rekomendasi penguatan koordinasi;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah satu studi kasus koordinasi pengawasan (bersumber dari laporan Ombudsman RI atau BPK) dan panduan analisis kasus ke LMS UNISAN, disertai rekaman kuliah (10-12 menit) yang menghubungkan konsep good governance dengan kerangka kelembagaan pengawasan yang telah	Bahan Kajian: • Mekanisme koordinasi antar-lembaga pengawasan pemerintahan; • Prinsip-prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law; • Keterkaitan good governance dengan kelembagaan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kelembagaan; dinilai berdasarkan ketajaman analisis, penggunaan konsep yang tepat, dan relevansi contoh yang dikemukakan Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi konstruktif dalam forum simulasi sidang mini yang mengharuskan mahasiswa berargumen berbasis data laporan lembaga resmi dan regulasi; menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi kepentingan publik (nilai	dosen bertindak sebagai moderator dan memberikan umpan balik substantif (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa draf laporan analisis kasus yang telah disusun secara daring, mempresentasikan rekomendasi awal dalam simulasi sidang mini, menerima umpan balik dari dosen dan sejawat, kemudian merevisi laporan berdasarkan masukan untuk pengumpulan final MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan unsur simulasi: kelompok lintas-lembaga berkolaborasi merumuskan rekomendasi penguatan koordinasi antar-lembaga pengawasan untuk kasus yang dianalisis, mempresentasikannya	dipelajari (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses studi kasus dan panduan di LMS, menelaah laporan tahunan Ombudsman RI 2022 atau laporan BPK terkait daerah di Kawasan Timur Indonesia secara mandiri, kemudian menyusun draf laporan analisis kasus melalui Google Docs dan berbagi tautan untuk umpan balik sejawat via LMS MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis studi kasus koordinasi pengawasan yang disiapkan dosen, mengidentifikasi prinsip good governance yang terlanggar dan lembaga pengawasan yang	pengawasan; • Evaluasi efektivitas koordinasi pengawasan melalui studi kasus pemerintah daerah; • Rekomendasi awal penguatan koordinasi kelembagaan pengawasan; Pustaka: Sulistiyan (2011); Bovaird & Löffler (2016); Ombudsman Republik Indonesia (2022); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Service dan Integrity ICHSA-N) Tugas: Laporan analisis kasus koordinasi pengawasan (format terstruktur: latar belakang kasus, identifikasi lembaga yang terlibat, analisis celah koordinasi berbasis prinsip good governance, dan rekomendasi awal); panjang 500-700 kata, format Google Docs atau PDF	dalam format sidang mini yang menuntut argumen berbasis regulasi dan data, mencerminkan nilai Harmony dan Service ICHSA-N dalam proses kolaborasi lintas perspektif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara mandiri menyusun laporan analisis kasus koordinasi pengawasan pemerintahan dengan struktur baku: (1) latar belakang kasus beserta sumber data, (2) identifikasi lembaga pengawasan yang terlibat dan dasar kewenangannya, (3) analisis celah koordinasi menggunakan minimal dua prinsip good governance, dan (4) rekomendasi awal penguatan koordinasi yang berorientasi kepentingan publik di Kawasan Timur Indonesia. Mahasiswa wajib mengacu pada	seharusnya mengambil peran, lalu menyusun rekomendasi awal secara tertulis sebelum pertemuan luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				minimal satu laporan resmi lembaga pengawasan (BPK, BPKP, atau Ombudsman RI) sebagai sumber data primer kasus. Jika menggunakan Generative AI sebagai alat bantu eksplorasi, wajib menyertakan pernyataan penggunaan dan verifikasi mandiri sesuai Pedoman Etis Penggunaan Generative AI UNISAN. Deliverable: Laporan analisis kasus koordinasi pengawasan sepanjang 500-700 kata (format terstruktur empat bagian seperti di atas), diunggah ke LMS UNISAN dalam format PDF paling lambat 3 hari setelah pertemuan Minggu 4; laporan ini menjadi dokumen dasar yang akan dikembangkan lebih lanjut pada analisis kasus mendalam di Minggu 6			
5,6	Sub-CPMK3: Mengidentifikasi dan	Mahasiswa mampu:	Bentuk Penilaian	BP — Mekanisme kuliah:	BP — Mekanisme kuliah:	Bahan Kajian:	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	mengklasifikasikan celah serta kelemahan pengawasan pada kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law).	- Menjelaskan empat dimensi good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law) dan keterkaitannya dengan tipologi pengawasan internal, eksternal, dan masyarakat pada konteks pemerintahan daerah - Mengidentifikasi minimal tiga celah pengawasan pada satu kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan dimensi good governance yang relevan - Mengklasifikasikan celah pengawasan yang ditemukan ke dalam kategori tipologi pengawasan (internal/eksternal/masyarakat) secara tepat	Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat daring (LMS) menguji kemampuan mahasiswa mengaitkan indikator good governance dengan celah pengawasan pada satu kasus ilustratif; dinilai dari ketepatan pemetaan dimensi ke celah (benar/sebagian/salah) dan kelengkapan argumen ringkas Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok berbasis kasus: frekuensi kontribusi substansif,	Dosen memfasilitasi diskusi pleno berbasis kasus nyata (case discussion): mempresentasikan satu kasus pengawasan daerah Kawasan Timur Indonesia, memandu kelompok kecil (3-4 orang) dalam pengisian tabel klasifikasi, dan memberikan umpan balik formatif langsung terhadap hasil kerja kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mengisi tabel klasifikasi celah pengawasan berdasarkan kasus yang dipilih, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara singkat (5 menit per kelompok), dan menerima umpan balik dari dosen dan rekan	Dosen mengunggah video pengantar (15-20 menit) yang menjelaskan empat dimensi good governance dan keterkaitan tipologi pengawasan menggunakan contoh kasus BPK/BPKP di pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia; menyediakan forum diskusi async di LMS untuk respons mahasiswa terhadap kasus pemantik (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video pengantar, membaca bahan bacaan yang diunggah dosen, menelusuri laporan BPK atau Ombudsman RI yang relevan via portal resmi, lalu merespons pertanyaan pemantik di forum diskusi LMS sebelum sesi luring	- Kerangka good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law; - Tipologi pengawasan pemerintahan daerah: internal, eksternal, dan masyarakat; - Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia dalam laporan BPK dan Ombudsman RI; Pustaka: Bovaird & Löffler (2016); Sulistiyani (2011); Republik Indonesia (2004); Ombudsman Republik Indonesia (2022); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan disertai bukti faktual dari kasus Menyajikan hasil identifikasi celah pengawasan secara sistematis dalam format tabel klasifikasi dimensi-celah-tipologi dengan argumen yang koheren	ketepatan penggunaan konsep good governance, dan sikap menghargai perspektif rekan (rubrik kolaborasi 1-4) Tugas: Lembar kerja analisis awal: tabel klasifikasi celah pengawasan (dimensi good governance x tipologi pengawasan) untuk satu kasus pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia yang dipilih kelompok, disertai narasi deskriptif 300-500 kata; dikumpulkan via LMS UNISAN	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi kelompok kecil berbasis kasus nyata pengawasan pemerintahan daerah, diikuti presentasi hasil dan sesi pleno untuk menyinkronkan pemahaman konsep good governance dan tipologi pengawasan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok (3-4 mahasiswa) memilih satu kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia yang terdokumentasi dalam laporan BPK, BPKP, atau Ombudsman RI. Kelompok mengisi tabel klasifikasi celah pengawasan dengan memetakan temuan faktual ke dalam empat dimensi good governance dan tiga	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri mengeksplorasi kasus pengawasan pemerintahan daerah dari portal BPK/BPKP/Ombudsman RI, mengidentifikasi dimensi good governance yang terlanggar, dan mendiskusikan temuan awal secara daring sebelum analisis mendalam di kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tipologi pengawasan, disertai narasi deskriptif yang menjelaskan dasar klasifikasi. Sumber data harus tercantum dan dapat diverifikasi. Tabel ini menjadi fondasi analisis mendalam di Minggu 6. Deliverable: Tabel klasifikasi celah pengawasan (format Google Sheets/Docs) berdimensi empat kolom (dimensi good governance, celah yang ditemukan, tipologi pengawasan, sumber/bukti faktual) ditambah narasi deskriptif 300-500 kata; diunggah ke LMS UNISAN sebelum Minggu 6			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri minggu ini; penilaian berfokus pada kualitas analisis	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu sesi presentasi antar kelompok (gallery walk atau panel singkat): setiap kelompok mempresentasikan temuan perbandingan kasus selama 8-10 menit, diikuti tanya	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan analisis perbandingan kasus (comparative case analysis guide) dan contoh penerapan kerangka good	Bahan Kajian: Analisis komparatif celah pengawasan pemerintahan daerah menggunakan kerangka good governance;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dan tugas kelompok Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi hasil analisis perbandingan kasus antar kelompok: kedalaman argumen, kemampuan merespons pertanyaan kritis dari rekan dan dosen, serta sikap terbuka terhadap perspektif berbeda (rubrik presentasi dan diskusi 1-4) Tugas: Laporan analisis perbandingan kasus: narasi analitis 600-800 kata yang	jawab kritis; dosen menyimpulkan pola kelemahan pengawasan yang muncul lintas kasus dan menghubungkannya dengan landasan regulasi pengawasan daerah (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan hasil analisis perbandingan kasus, memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok lain, dan mencatat sintesis dari pleno sebagai bahan penyempurnaan laporan akhir kelompok MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: presentasi dan diskusi panel antar kelompok berbasis analisis perbandingan kasus nyata, mendorong sintesis lintas perspektif kelembagaan	governance pada dua kasus nyata; membuka sesi konsultasi async via forum LMS untuk pertanyaan kelompok sebelum presentasi luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyempurnakan tabel klasifikasi Minggu 5, menambahkan kasus pembandingan dari portal BPK/BPKP/Ombudsman RI, dan menyusun draf laporan perbandingan secara kolaboratif menggunakan Google Docs; mengunggah draf ke LMS untuk umpan balik dosen MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis perbandingan dua kasus (comparative case discussion) secara	• Peran kelembagaan BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman dalam merespons kelemahan pengawasan daerah; • Pola kelemahan pengawasan berulang dan kaitannya dengan regulasi pengawasan daerah; Pustaka: Bovaird & Löffler (2016); Sulistiyani (2011); Republik Indonesia (2004); Ombudsman Republik Indonesia (2022); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Komisi Pemberantasan Korupsi (2020).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			membandingkan profil celah pengawasan dua kasus daerah berbeda menggunakan tabel klasifikasi yang telah disempurnakan dari Minggu 5; dikumpulkan via LMS UNISAN	dan regulasi pengawasan pemerintahan daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyempurnakan tabel klasifikasi dari Minggu 5 dengan menambahkan kasus pemerintahan daerah kedua dari Kawasan Timur Indonesia sebagai pembanding. Laporan analisis perbandingan disusun secara kolaboratif: mengidentifikasi pola kelemahan yang berulang, menghubungkan celah dengan kelembagaan pengawasan yang terkait (BPK/BPKP/Inspektorat/Ombudsman), dan mengaitkan temuan dengan regulasi yang berlaku. Laporan ini menjadi dasar analisis akar masalah di Minggu 7. Deliverable: Laporan analisis perbandingan	kolaboratif daring, dengan penelusuran mandiri sumber data sekunder resmi sebagai basis argumentasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kasus (Google Docs/PDF) berisi: tabel klasifikasi dua kasus yang disempurnakan, narasi analitis 600-800 kata, dan daftar sumber data sekunder resmi yang digunakan; diunggah ke LMS UNISAN			
7	Sub-CPMK4: Menganalisis akar masalah dan dampak kelemahan pengawasan pada kasus nyata pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan prinsip antikorupsi, dibuktikan dengan laporan analisis kasus tertulis minimal 2.000 kata.	Mahasiswa mampu: - Menganalisis akar masalah kelemahan pengawasan pada kasus nyata pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan minimal dua prinsip antikorupsi (transparansi, akuntabilitas, integritas, independensi) secara eksplisit dan berbasis bukti - Menguraikan rantai sebab-akibat antara akar masalah pengawasan dan dampaknya terhadap	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tersendiri; penilaian berbasis laporan analisis kasus individual yang menjadi komponen penilaian menuju UTS Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi kelas berbasis studi kasus desa: kedalaman	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi workshop analisis kasus: mahasiswa mempresentasikan kerangka laporan secara berpasangan untuk peer review (15 menit per pasang), dosen memberikan umpan balik formatif terhadap kerangka analisis akar masalah dan relevansi prinsip antikorupsi yang dipilih; sesi ditutup dengan sintesis dosen tentang pola akar masalah yang muncul lintas kasus desa (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan laporan analisis kasus (template struktur laporan dan rubrik penilaian), video pengantar prinsip antikorupsi dalam konteks pemerintahan desa (15 menit), dan contoh rantai sebab-akibat kelemahan pengawasan desa dari kasus yang dipublikasikan; membuka konsultasi daring via LMS untuk bimbingan penulisan laporan (via LMS;	Bahan Kajian: - Prinsip antikorupsi (transparansi, akuntabilitas, integritas, independensi) sebagai kerangka analisis kasus pengawasan; - Analisis akar masalah dan rantai dampak kelemahan pengawasan pemerintahan desa; - Respons kelembagaan BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman terhadap kasus pengawasan desa di Kawasan Timur Indonesia;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang teridentifikasi dari kasus nyata - Menilai kesesuaian respons kelembagaan (BPK/BPKP/Inspektoral/Ombudsman) terhadap kasus kelemahan pengawasan desa yang dianalisis berdasarkan prinsip antikorupsi - Menyusun laporan analisis kasus tertulis minimal 2.000 kata yang memuat identifikasi kasus, analisis akar masalah, dampak, penilaian respons kelembagaan, dan rekomendasi awal, dengan menggunakan prinsip antikorupsi sebagai kerangka analisis	analisis yang dikemukakan secara lisan, kemampuan mengaitkan prinsip antikorupsi dengan fakta kasus, dan integritas akademik dalam penggunaan sumber (rubrik diskusi 1-4) Tugas: Laporan analisis kasus individual: minimal 2.000 kata, mencakup identifikasi kasus nyata pemerintahan desa Kawasan Timur Indonesia, analisis akar masalah menggunakan prinsip antikorupsi, rantai dampak, penilaian	Mekanisme & materi: Mahasiswa memaparkan kerangka laporan dan temuan awal kepada rekan, menerima umpan balik peer, dan menyempurnakan argumen analisis akar masalah berdasarkan masukan; mencatat pola lintas kasus dari sintesis dosen sebagai bahan penguatan laporan final MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan peer review: workshop analisis kasus berbasis presentasi kerangka laporan berpasangan, mendorong refleksi kritis dan penguatan argumen analitis sebelum laporan final diselesaikan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelusuri kasus nyata pengawasan pemerintahan desa dari portal BPK, BPKP, KPK, atau media terpercaya; menyusun kerangka laporan analisis secara mandiri menggunakan Google Docs; mengonsultasikan kerangka via forum LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri memilih dan menganalisis kasus nyata pengawasan pemerintahan desa, mengaplikasikan prinsip antikorupsi sebagai kerangka analisis, dengan dukungan konsultasi daring	Pustaka: Bovaird & Löffler (2016); Sulistiyani (2011); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Ombudsman Republik Indonesia (2022); Republik Indonesia (2004).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			respons kelembagaan, dan rekomendasi awal; dilengkapi pernyataan penggunaan AI jika digunakan; dikumpulkan via LMS UNISAN	Tugas: Setiap mahasiswa secara individual memilih satu kasus nyata kelemahan pengawasan pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia yang terdokumentasi dari sumber resmi (laporan BPK, BPKP, KPK, atau Ombudsman RI). Laporan analisis kasus disusun menggunakan prinsip antikorupsi sebagai kerangka analisis, mencakup: (1) identifikasi dan latar belakang kasus, (2) analisis akar masalah menggunakan minimal dua prinsip antikorupsi secara eksplisit, (3) rantai dampak kelemahan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, (4) penilaian kesesuaian respons kelembagaan, dan (5) rekomendasi awal penguatan pengawasan. Penggunaan Generative AI wajib disertai pernyataan penggunaan dan verifikasi mandiri substansi. Laporan	asinkron Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ini merupakan komponen penilaian menuju UTS dan menjadi dasar kontekstual untuk kajian SPIP pada Minggu 9-10. Deliverable: Laporan analisis kasus tertulis individual minimal 2.000 kata (PDF/Google Docs), dilengkapi daftar pustaka dari sumber primer yang terverifikasi, dan pernyataan penggunaan AI (jika ada); diunggah ke LMS UNISAN paling lambat tiga hari setelah sesi luring Minggu 7			
8		Mahasiswa mampu: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan celah pengawasan pada kasus pemerintahan daerah menggunakan kerangka good governance secara mandiri dan tanpa bantuan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Tengah Semester dalam bentuk ujian esai terstruktur: mahasiswa menganalisis satu atau dua kasus pengawasan pemerintahan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen atau pengawas melaksanakan UTS dalam bentuk ujian esai terstruktur di ruang kelas; dosen menyajikan kasus pengawasan pemerintahan daerah sebagai basis soal; pengawasan dilakukan sesuai tata tertib akademik UNISAN (tatap muka di	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah kisi-kisi UTS, lembar petunjuk teknis pengerjaan ujian, dan rubrik penilaian ke LMS UNISAN minimal tiga hari sebelum pelaksanaan; membuka sesi tanya jawab singkat via forum LMS untuk klarifikasi cakupan	Bahan Kajian: Reviu komprehensif: konsep dasar pengawasan, landasan hukum dan hierarki regulasi, tipologi pengawasan, kelembagaan BPK-BPKP-Inspektorat-Ombudsman, kerangka good governance, dan analisis kasus	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Menganalisis akar masalah kelemahan pengawasan menggunakan prinsip antikorupsi dan tipologi pengawasan yang relevan dalam jawaban tertulis yang terstruktur • Menghubungkan peran kelembagaan pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat, Ombudsman) dengan celah pengawasan yang teridentifikasi pada kasus yang disajikan • Menyajikan argumen analitis yang koheren, logis, dan didukung rujukan konseptual dari bahan kajian Minggu 1 sampai 7 dalam jawaban ujian	daerah yang disajikan penguji menggunakan kerangka good governance dan prinsip antikorupsi; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi celah, kedalaman analisis akar masalah, keterkaitan kelembagaan, dan koherensi argumen (rubrik analitis 0-100) Partisipasi kelas & laboratorium: Tidak berlaku pada sesi UTS; ketertiban dan integritas akademik selama ujian menjadi prasyarat penilaian	kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal ujian esai terstruktur secara mandiri: menganalisis kasus yang disajikan menggunakan kerangka konseptual yang telah dipelajari dari Minggu 1 sampai 7 dan menyajikan argumen analitis dalam jawaban tertulis MP — Metode Pembelajaran: Asesmen komprehensif individual: ujian esai terstruktur berbasis kasus untuk mengukur ketercapaian kumulatif Sub-CPMK 1 hingga Sub-CPMK 4 secara terintegrasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	materi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses kisi-kisi dan rubrik di LMS, melakukan revidi mandiri terhadap bahan kajian Minggu 1 sampai 7 (konsep dasar pengawasan, landasan hukum, tipologi, kelembagaan, good governance, analisis kasus), dan mempersiapkan pemahaman konseptual untuk ujian MP — Metode Pembelajaran: Pemelajaran mandiri berbasis revidi kumulatif: mahasiswa mensintesiskan pemahaman lintas topik Minggu 1-7 sebagai persiapan ujian komprehensif	pengawasan pemerintahan daerah dan desa; Pustaka: Bovaird & Löffler (2016); Sulistiyani (2011); Republik Indonesia (2004); Republik Indonesia (2008); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Ombudsman Republik Indonesia (2022); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Tidak ada tugas tambahan pada minggu UTS; penilaian bersumber dari jawaban ujian esai terstruktur	Tidak ada penugasan terstruktur di luar ujian pada Minggu 8. Mahasiswa diarahkan untuk mereview secara mandiri seluruh bahan kajian Minggu 1 sampai 7, termasuk laporan analisis kasus yang telah disusun pada Minggu 7, sebagai persiapan UTS. Setelah UTS, dosen memberikan umpan balik umum terhadap kecenderungan kelemahan jawaban sebagai bahan perbaikan untuk paruh kedua semester. Deliverable: Lembar jawaban ujian esai terstruktur yang diserahkan kepada pengawas/dosen pada akhir sesi UTS	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		
9,10	Sub-CPMK5: Mendeskripsikan kerangka normatif dan komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP 60/2008, serta menjelaskan keterkaitan	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi dasar hukum dan hierarki regulasi yang menopang SPIP sesuai PP 60/2008 secara	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis tertulis singkat: mahasiswa	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan ceramah interaktif (20 menit) menyajikan peta konsep lima komponen SPIP menggunakan LCD	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pengantar (15-20 menit) yang memaparkan latar belakang lahirnya PP 60/2008, hierarki	Bahan Kajian: • Kerangka normatif SPIP: PP 60/2008 dan hierarki regulasi pengawasan intern;	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	antar-komponen SPIP dalam siklus pengendalian pada satuan kerja pemerintah daerah.	tepat • Menjabarkan lima komponen SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan) beserta elemen pembentuknya • Menjelaskan keterkaitan logis antar-komponen SPIP dalam siklus pengendalian intern pada satuan kerja pemerintah daerah • Memetakan posisi SPIP dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara sistematis • Membedakan peran pimpinan satuan kerja sebagai penanggung jawab utama	mengidentifikasi dan mengurutkan komponen SPIP serta menghubungkan tiap komponen dengan klausul PP 60/2008 yang relevan; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi dan kelengkapan hubungan antar-komponen Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan bertanya dan merespons pertanyaan pemantik selama sesi diskusi; dinilai dari relevansi argumen, kejujuran akademik dalam menyampaikan sumber, dan sikap	proyektor; memfasilitasi sesi tanya-jawab terstruktur dan latihan pemetaan komponen secara kelompok kecil (3-4 orang) (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menelusuri satu pasal PP 60/2008 yang ditugaskan per kelompok, mengekstrak elemen kunci, dan mempresentasikan temuan singkat (5 menit per kelompok) kepada kelas; kemudian masing-masing menyusun bagan alir individu sebagai luaran sesi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: tiap kelompok kecil menganalisis cuplikan dokumen SPIP nyata	regulasi, dan anatomi lima komponen SPIP; menyediakan forum diskusi di LMS UNISAN dengan pertanyaan pemantik tentang relevansi SPIP bagi satuan kerja di Kawasan Timur Indonesia (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan menelaah bahan bacaan utama (PP 60/2008 dan Pedoman BPKP 2021) sebelum sesi; berpartisipasi dalam forum diskusi daring dengan memposting minimal satu tanggapan substantif; menyusun bagan alir komponen SPIP menggunakan Google Docs atau Canva dan mengunggahnya ke LMS MP — Metode Pembelajaran:	• Lima komponen SPIP dan elemen pembentuknya; • Keterkaitan antar-komponen dalam siklus pengendalian intern; • Peran pimpinan satuan kerja dan APIP dalam penyelenggaraan SPIP; • Posisi SPIP dalam kerangka good governance pemerintah daerah; Pustaka: Republik Indonesia (2008); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); COSO (2013); Sulistiyani (2011).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelenggaraan SPIP dari peran APIP sebagai pembina	menghargai perspektif rekan (nilai Integrity dan Harmony) Tugas: Bagan alir siklus pengendalian intern: mahasiswa menyusun satu diagram alir yang menggambarkan keterkaitan lima komponen SPIP dalam satu siklus pengendalian pada satuan kerja pemerintah daerah pilihan, disertai narasi penjas 300-400 kata; dikumpulkan via LMS UNISAN	(PKPT atau laporan evaluasi SPIP) dari satu SKPD di Kawasan Timur Indonesia untuk menemukan komponen yang terimplementasi, lalu menyajikan hasil analisis dalam forum kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun bagan alir siklus pengendalian intern yang menggambarkan keterkaitan lima komponen SPIP berdasarkan PP 60/2008. Bagan harus menunjukkan arus informasi dan umpan balik antar-komponen dalam satu siklus pengendalian pada satuan kerja pemerintah daerah yang dipilih secara mandiri. Narasi penjas wajib merujuk setidaknya dua sumber dari daftar pustaka RPS dan mencantumkan	Case-Based Learning: mahasiswa mencermati penggalan laporan pengawasan satuan kerja pemerintah daerah nyata (tersedia di portal BPKP atau BPK) untuk mengidentifikasi komponen SPIP yang disebut, kemudian mendiskusikan temuan secara daring di forum LMS Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pernyataan penggunaan Generative AI apabila digunakan sebagai alat bantu eksplorasi kerangka. Deliverable: Satu file bagan alir (format PDF atau PNG) beserta narasi penjas 300-400 kata dalam Google Docs, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat sebelum sesi Minggu 10 dimulai			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; capaian diukur melalui kualitas laporan analisis implementasi yang memenuhi kerangka normatif dari Minggu 9	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi presentasi singkat dua atau tiga kelompok yang memaparkan temuan awal analisis implementasi SPIP SKPD masing-masing; memberikan umpan balik formatif langsung dan menghubungkan temuan dengan konsep maturitas SPIP (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan rekaman kuliah singkat (10-15 menit) yang memandu mahasiswa dalam membaca laporan evaluasi SPIP dari portal BPKP; membuka sesi diskusi asinkron di LMS UNISAN untuk berbagi temuan analisis antar-mahasiswa (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Implementasi lima komponen SPIP pada satuan kerja pemerintah daerah; • Tingkat maturitas pengendalian intern (level 1-5 SPIP); • Faktor pendorong dan penghambat implementasi SPIP di pemerintah daerah;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam diskusi studi kasus implementasi SPIP; dinilai dari kedalaman analisis yang disampaikan secara lisan, ketepatan merujuk PP 60/2008, dan sikap kritis yang konstruktif serta menghargai keberagaman temuan rekan (nilai Harmony dan Integrity) Tugas: Laporan analisis implementasi SPIP: dokumen tertulis 600-800 kata yang menganalisis penerapan	Mahasiswa secara berpasangan melakukan penelaahan silang (peer review) laporan analisis rekan dengan panduan rubrik sederhana; kemudian merevisi dan melengkapi laporan berdasarkan masukan; dosen menutup sesi dengan sintesis temuan lintas SKPD yang menggarisbawahi variasi implementasi SPIP di Kawasan Timur Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: tiap pasangan atau kelompok kecil mengerjakan kasus nyata implementasi SPIP dari SKPD berbeda, membandingkan temuan, dan mengidentifikasi pola umum hambatan implementasi yang relevan dengan konteks daerah	Mahasiswa mengakses laporan evaluasi SPIP atau hasil revidi SPIP dari situs resmi BPKP, BPK, atau Inspektorat daerah di Kawasan Timur Indonesia; mengisi lembar kerja analisis komponen SPIP secara mandiri menggunakan Google Sheets dan berbagi temuan awal di forum diskusi sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mulai mengerjakan proyek analisis implementasi SPIP untuk satu SKPD pilihan yang akan berlanjut menjadi matriks kinerja pengendalian pada Minggu 11-12, sehingga laporan minggu ini menjadi data awal proyek tersebut	• Sumber data sekunder evaluasi SPIP: portal BPKP, BPK, dan Inspektorat; • Konteks kelembagaan SPIP di Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Republik Indonesia (2008); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); COSO (2013); Republik Indonesia (2004).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			minimal tiga dari lima komponen SPIP pada satu SKPD nyata di Kawasan Timur Indonesia, dilengkapi tabel perbandingan kondisi aktual versus normatif; dikumpulkan via LMS UNISAN	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun laporan analisis implementasi SPIP pada satu SKPD nyata di Kawasan Timur Indonesia. Laporan menganalisis kondisi aktual implementasi minimal tiga dari lima komponen SPIP, membandingkannya dengan standar normatif PP 60/2008 dan Pedoman BPKP 2021, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Sumber data dapat berupa laporan evaluasi SPIP yang diunduh dari portal resmi BPKP, BPK, atau Inspektorat. Laporan menjadi bahan dasar penyusunan matriks kinerja pengendalian pada Minggu 11.	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Laporan tertulis 600-800 kata (Google Docs, format PDF) dilengkapi satu tabel perbandingan kondisi aktual versus normatif untuk tiap komponen SPIP yang dianalisis, diunggah ke LMS UNISAN sebelum sesi Minggu 11 dimulai			
11,12	Sub-CPMK6: Mengevaluasi efektivitas implementasi komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan SPIP pada satuan kerja pemerintah daerah, serta merumuskan temuan evaluatif dalam format matriks kinerja pengendalian yang terukur.	Mahasiswa mampu: • Mengevaluasi efektivitas komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan SPIP pada satuan kerja pemerintah daerah menggunakan kriteria yang terukur • Mengonstruksi matriks kinerja pengendalian yang memuat kolom komponen, indikator kinerja, target, realisasi, kesenjangan, dan rekomendasi awal	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; capaian diukur melalui kualitas matriks kinerja pengendalian yang dihasilkan, mencakup kelengkapan kolom, kedalaman analisis kesenjangan, dan konsistensi logis antara temuan dan rekomendasi awal	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi workshop (30 menit) yang memandu pengisian kolom matriks secara langsung menggunakan contoh kasus SKPD di layar proyektor; kemudian memfasilitasi kerja kelompok dengan rotasi umpan balik antar-kelompok (gallery walk singkat) (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam kelompok (3-4 orang) menyusun draf matriks	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan teknis penyusunan matriks kinerja pengendalian (template Google Sheets) beserta video tutorial singkat (10 menit) yang menjelaskan cara mengisi kolom kesenjangan dan merumuskan temuan evaluatif secara terukur (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh template matriks dari	Bahan Kajian: • Kerangka evaluasi efektivitas komponen SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan; • Konstruksi matriks kinerja pengendalian: indikator, target, realisasi, dan kesenjangan; • Metode pengumpulan bukti evaluasi pengendalian intern; • Interpretasi temuan evaluatif berbasis bukti	13

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		secara sistematis • Menginterpretasikan data hasil evaluasi untuk merumuskan temuan evaluatif yang didukung bukti dokumen • Membedakan kelemahan substantif dari ketidaksesuaian prosedural dalam implementasi SPIP berdasarkan analisis matriks • Menerapkan prinsip objektivitas dan akuntabilitas dalam proses evaluasi sebagai perwujudan nilai Integrity dan Service kepada publik	Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam sesi workshop evaluasi: dinilai dari kemampuan memberikan argumen evaluatif yang berbasis bukti, kesediaan menerima umpan balik rekan secara konstruktif, dan kolaborasi aktif dalam kelompok sebagai cerminan nilai Harmony Tugas: Draf matriks kinerja pengendalian: tabel terstruktur dalam Google Sheets atau Microsoft Excel yang memuat minimal tiga komponen SPIP (lingkungan	kinerja pengendalian di laboratorium komputer menggunakan data SKPD masing-masing; melakukan satu putaran peer review terstruktur dengan kelompok lain menggunakan rubrik penilaian yang disediakan dosen; merevisi draf berdasarkan masukan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: workshop penyusunan matriks kinerja pengendalian berbasis data nyata SKPD di Kawasan Timur Indonesia; dosen bertindak sebagai fasilitator yang memberikan umpan balik teknis dan konseptual selama proses kerja kelompok berlangsung Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	LMS UNISAN, mengisi data berdasarkan laporan analisis yang disusun pada Minggu 10, dan mengunggah draf awal ke folder bersama Google Drive kelompok untuk direviu sebelum sesi luring; berpartisipasi dalam forum LMS untuk mendiskusikan kesulitan teknis pengisian matriks MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa melanjutkan proyek analisis SKPD dari Minggu 10 dengan mengolah temuan analisis implementasi menjadi matriks kinerja pengendalian yang terstruktur, menggunakan SPSS atau Excel untuk menghitung persentase ketercapaian indikator bila data kuantitatif tersedia	dokumen; • Prinsip objektivitas dan akuntabilitas dalam evaluasi pengendalian intern; Pustaka: COSO (2013); Republik Indonesia (2008); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); Bovaird dan Löffler (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengendalian, penilaian risiko, pemantauan) dengan masing-masing minimal tiga indikator kinerja, kolom target, realisasi, kesenjangan, dan temuan evaluatif; disertai narasi interpretasi 400-500 kata	Mahasiswa dalam kelompok (3-4 orang) menyusun draf matriks kinerja pengendalian untuk SKPD yang telah dianalisis sejak Minggu 10. Matriks mencakup tiga komponen SPIP yang dievaluasi (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan), dengan masing-masing komponen memuat minimal tiga indikator kinerja yang dilengkapi kolom target normatif, kondisi realisasi berdasarkan bukti dokumen, skor kesenjangan, dan rumusan temuan evaluatif awal. Narasi interpretasi menjelaskan pola kesenjangan yang ditemukan dan implikasinya bagi penguatan pengendalian intern satuan kerja. Draf ini akan disempurnakan pada Minggu 12.	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Draf matriks kinerja pengendalian dalam format Google Sheets atau Excel (diekspor ke PDF) disertai narasi interpretasi 400-500 kata dalam Google Docs, diunggah ke LMS UNISAN sebelum sesi Minggu 12 dimulai			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; capaian diukur melalui kualitas matriks kinerja pengendalian final dan presentasi kelompok; dinilai berdasarkan kelengkapan matriks, kedalaman rekomendasi, konsistensi antara temuan dan usulan tindak	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok (10-12 menit per kelompok) menggunakan LCD proyektor; memberikan umpan balik evaluatif terstruktur setelah setiap presentasi dan memimpin diskusi kelas untuk menyintesis temuan lintas SKPD; menutup sesi dengan refleksi tentang implikasi hasil evaluasi bagi penguatan SPIP di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan rubrik penilaian matriks final dan panduan rekomendasi tindak lanjut di LMS UNISAN; membuka sesi konsultasi daring singkat (office hours virtual via platform yang tersedia) bagi kelompok yang memerlukan bimbingan sebelum presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyempurnakan matriks dan menyusun	Bahan Kajian: • Penyusunan rekomendasi tindak lanjut penguatan pengendalian intern yang terukur dan kontekstual; • Validasi temuan evaluatif terhadap standar normatif SPIP; • Penyajian hasil evaluasi SPIP kepada pemangku kepentingan; • Implikasi temuan evaluasi bagi peningkatan maturitas SPIP satuan kerja	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lanjut, serta kemampuan menjawab pertanyaan kritis dari dosen dan rekan Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas tanya-jawab antar-kelompok selama presentasi: dinilai dari kedalaman pertanyaan yang diajukan, ketepatan argumen dalam merespons, dan sikap kolaboratif yang mencerminkan nilai Harmony dan Service kepada kepentingan publik Tugas:	Tiap kelompok mempresentasikan matriks kinerja pengendalian final dan rekomendasi di depan kelas; kelompok pendengar mengajukan minimal satu pertanyaan kritis menggunakan lembar tanya-jawab terstruktur; setelah semua kelompok presentasi, mahasiswa secara individual menuliskan satu refleksi singkat (150-200 kata) tentang pembelajaran dari perbandingan antar-kasus SKPD MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: sesi presentasi dan diskusi kritis hasil proyek analisis SPIP; dosen dan rekan bertindak sebagai panel evaluator yang menguji konsistensi temuan, kedalaman analisis, dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan kelompok	bahan presentasi secara kolaboratif menggunakan Google Slides atau Canva; mengunggah versi final matriks dan bahan presentasi ke LMS UNISAN setidaknya satu hari sebelum sesi luring agar dapat diakses oleh seluruh kelas sebagai bahan diskusi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tahap finalisasi proyek analisis SPIP yang dimulai dari Minggu 10; mahasiswa mengintegrasikan seluruh data dan analisis ke dalam produk akhir berupa matriks kinerja pengendalian final dengan rekomendasi yang siap dipresentasikan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	pemerintah daerah; • Orientasi Service dan Adaptability dalam rekomendasi kebijakan pengendalian intern; Pustaka: COSO (2013); Republik Indonesia (2008); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); Bovaird dan Löffler (2016); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Matriks kinerja pengendalian final beserta rekomendasi tindak lanjut: dokumen tabel lengkap (Google Sheets atau Excel) yang memuat semua kolom termasuk rekomendasi spesifik per kesenjangan, disertai laporan naratif 600-800 kata dan bahan presentasi (Google Slides atau Canva, minimal 8 slide)	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyempurnakan draf matriks kinerja pengendalian dari Minggu 11 dengan melengkapi kolom rekomendasi tindak lanjut yang spesifik untuk setiap temuan kesenjangan. Rekomendasi harus mempertimbangkan kapasitas kelembagaan satuan kerja, konteks regulasi PP 60/2008, dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Laporan naratif merangkum proses evaluasi, temuan utama, dan implikasi rekomendasi bagi penguatan pengendalian intern satuan kerja. Bahan presentasi menyajikan poin-poin kunci matriks secara visual. Keseluruhan produk ini menandai penyelesaian satu siklus analisis SPIP yang akan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menjadi dasar pengembangan instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi pada Minggu 13-14. Deliverable: Tiga komponen: (1) matriks kinerja pengendalian final (Google Sheets atau Excel, diekspor PDF) yang memuat kolom komponen, indikator, target, realisasi, kesenjangan, temuan evaluatif, dan rekomendasi tindak lanjut; (2) laporan naratif 600-800 kata (Google Docs, PDF); (3) bahan presentasi minimal 8 slide (Google Slides atau Canva, PDF); semua diunggah ke LMS UNISAN sebelum sesi Minggu 12 dimulai			
13	Sub-CPMK7: Menganalisis kebutuhan dan merancang arsitektur konseptual instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi (e-audit, dashboard kinerja, atau	Mahasiswa mampu: Mengidentifikasi kebutuhan fungsional instrumen pengawasan berbasis TI (e-audit, dashboard kinerja, atau	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi kelas tatap muka dengan pemaparan singkat (15 menit) tentang tipologi instrumen pengawasan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah singkat (20-25 menit) di LMS UNISAN yang memaparkan konsep e-	Bahan Kajian: Instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi: konsep e-audit, dashboard kinerja pemerintah, dan sistem	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	sistem pelaporan pengaduan daring) yang sesuai dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia.	sistem pelaporan pengaduan daring) pada minimal dua satuan kerja pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data kapasitas kelembagaan • Menganalisis kesenjangan antara kapasitas TI yang tersedia dan kebutuhan ideal instrumen pengawasan pada konteks pemerintah daerah atau desa yang dipilih • Merancang arsitektur konseptual instrumen pengawasan berbasis TI yang mencakup komponen utama, alur data, pengguna (user roles), dan integrasi dengan sistem SPIP yang berlaku • Mengevaluasi kesesuaian rancangan	penilaian difokuskan pada produk rancangan arsitektur konseptual dan kualitas analisis kebutuhan kelembagaan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi analisis kebutuhan berbasis studi kasus pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia: ketajaman pertanyaan, ketepatan identifikasi kesenjangan kapasitas TI, dan sikap kritis-konstruktif saat memberi umpan balik antartim Tugas:	berbasis TI di konteks pemerintahan Indonesia; dilanjutkan pendampingan langsung saat tim mempresentasikan draf arsitektur konseptual (setiap tim 7 menit presentasi dan 5 menit umpan balik); dosen memberikan panduan perbaikan berbasis checklist arsitektur yang selaras dengan SPIP dan pedoman BPKP (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyiapkan draf diagram arsitektur konseptual di Canva atau Figma dan mempresentasikannya di depan kelas; mencatat umpan balik dosen dan rekan sebagai dasar revisi; menggunakan laboratorium komputer untuk menyempurnakan diagram dan melengkapi narasi justifikasi desain	audit, dashboard kinerja pemerintah, dan sistem pelaporan pengaduan daring; menambahkan anotasi pada dokumen regulasi terkait (PP 60/2008 dan pedoman BPKP) sebagai panduan analisis; membuka forum diskusi asinkron di LMS untuk respons pertanyaan mahasiswa selama 48 jam (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah video kuliah dan bahan regulasi yang diunggah dosen; mengunduh template analisis kebutuhan dari LMS; mengakses portal BPK, BPKP, dan Ombudsman RI untuk mengumpulkan data kapasitas TI satuan kerja yang dipilih; mengeksplorasi literatur pendukung secara mandiri dan mendokumentasikan	pelaporan pengaduan daring; • Analisis kapasitas kelembagaan TI pada pemerintah daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia; • Arsitektur konseptual sistem pengawasan: komponen fungsional, alur data, dan integrasi dengan SPIP; • Prinsip user-centered design dalam pengembangan instrumen pengawasan pemerintah; Pustaka: Republik Indonesia (2008); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); Bovaird & Löffler (2016); Committee of Sponsoring Organizations of the	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		arsitektur dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia • Menyajikan diagram arsitektur konseptual secara sistematis disertai justifikasi pilihan desain yang adaptif terhadap keterbatasan infrastruktur digital daerah	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Arsitektur Konseptual Instrumen Pengawasan Berbasis TI: mencakup (1) profil kapasitas kelembagaan satuan kerja yang dikaji, (2) matriks kebutuhan fungsional, (3) diagram arsitektur konseptual (dibuat di Canva atau Figma), dan (4) narasi justifikasi desain; panjang laporan tertulis 1.200-1.800 kata di luar diagram, dikumpulkan via LMS UNISAN	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan teknik gallery walk: setiap tim menampilkan poster digital arsitektur konseptual di layar proyektor secara bergiliran; tim lain memberikan ulasan tertulis menggunakan lembar umpan balik terstruktur, melatih nilai Harmony melalui kolaborasi lintas perspektif dan Adaptability dalam menyesuaikan rancangan dengan konteks lokal Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap tim (3-4 mahasiswa) memilih satu satuan kerja pemerintah daerah atau pemerintah desa di Kawasan Timur Indonesia sebagai objek studi, melakukan analisis kebutuhan instrumen	temuan di Google Docs sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara berkelompok (3-4 orang) melaksanakan tahap analisis kebutuhan proyek instrumen pengawasan berbasis TI yang akan dikembangkan hingga Minggu 14, dengan kerangka kerja yang mengacu pada siklus pengembangan sistem berorientasi pengguna (user-centered design) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Treadway Commission (2013).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengawasan berbasis TI berdasarkan data sekunder dari portal BPK, BPKP, Inspektorat, dan Ombudsman RI, kemudian merancang arsitektur konseptual instrumen pengawasan (e-audit, dashboard kinerja, atau sistem pelaporan pengaduan daring) yang adaptif terhadap kapasitas kelembagaan setempat. Rancangan harus mencakup komponen fungsional, alur data antarlembaga pengawas, dan peran pengguna (user roles). Penggunaan Generative AI diizinkan sebatas pembuatan kerangka draf dengan kewajiban mencantumkan pernyataan penggunaan dan verifikasi mandiri substansi sesuai Pedoman Etis Penggunaan Generative AI UNISAN. Deliverable: Satu dokumen PDF yang diunggah ke LMS UNISAN berisi: (1)			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				profil kapasitas TI satuan kerja yang dikaji (maks. 300 kata), (2) matriks kebutuhan fungsional instrumen pengawasan (format tabel di Google Sheets yang disematkan atau dilampirkan), (3) diagram arsitektur konseptual hasil Canva atau Figma (minimal satu halaman visual), dan (4) narasi justifikasi desain 1.200-1.800 kata; batas pengumpulan tiga hari sebelum pertemuan Minggu 14			
14	Sub-CPMK8: Mengembangkan prototipe atau blueprint lengkap instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi yang akuntabel dan adaptif, dilengkapi spesifikasi teknis, indikator kinerja utama (IKU), dan mekanisme tindak lanjut temuan.	Mahasiswa mampu: • Mengembangkan prototipe atau blueprint lengkap instrumen pengawasan berbasis TI yang mencakup spesifikasi teknis antarmuka, alur kerja (workflow) pemeriksaan atau pelaporan, dan mekanisme tindak lanjut temuan secara	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian dilakukan melalui demonstrasi prototipe dan dokumen blueprint yang diserahkan, dinilai menggunakan rubrik yang	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi demonstrasi prototipe di laboratorium komputer; setiap tim (10 menit demonstrasi dan 5 menit tanya jawab) mempresentasikan antarmuka prototipe yang telah dikembangkan; dosen dan rekan memberikan evaluasi menggunakan lembar penilaian rubrik	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan teknis pengembangan blueprint instrumen pengawasan di LMS UNISAN (dokumen atau video 15-20 menit), mencakup contoh IKU dari laporan BPKP dan praktik e-audit internasional; membuka sesi konsultasi daring melalui Google	Bahan Kajian: • Perancangan e-audit dan dashboard kinerja pemerintah: spesifikasi teknis dan antarmuka pengguna; • Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sistem pengawasan pemerintah berbasis teknologi;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terinci • Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan relevan untuk mengukur efektivitas instrumen pengawasan yang dirancang, selaras dengan komponen SPIP dan konteks pemerintah daerah yang dikaji • Mengintegrasikan mekanisme akuntabilitas dan umpan balik (feedback loop) ke dalam prototipe sehingga temuan pengawasan dapat ditindaklanjuti secara sistematis oleh satuan kerja yang bersangkutan • Mendemonstrasikan prototipe atau blueprint kepada rekan sejawat dan mengevaluasi kelayakan teknisnya berdasarkan kriteria	mencakup kelengkapan spesifikasi teknis, ketepatan IKU, dan kualitas mekanisme tindak lanjut temuan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi demonstrasi dan review antartim: kualitas umpan balik teknis yang diberikan kepada tim lain, kemampuan mempertahankan keputusan desain dengan argumen berbasis regulasi dan data, serta sikap terbuka terhadap masukan perbaikan Tugas:	yang mencakup kelengkapan spesifikasi, ketepatan IKU, dan kualitas mekanisme tindak lanjut; dosen merangkum perbaikan umum di 15 menit akhir (tatap muka di kelas). MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan demonstrasi produk (product showcase): setiap tim menampilkan prototipe fungsional kepada seluruh kelas; rekan memberikan evaluasi terstruktur menggunakan rubrik peer-review yang telah dibagikan sebelumnya, mendorong nilai Harmony melalui kolaborasi evaluatif dan Service melalui orientasi produk kepada kebutuhan publik Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Meet terjadwal (satu sesi 60 menit) untuk mendampingi tim menyelesaikan prototipe sebelum pertemuan luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh panduan teknis dari LMS; secara tim mengerjakan pengembangan prototipe di Canva atau Figma dan dokumen spesifikasi teknis di Google Docs; berkonsultasi dengan dosen melalui sesi daring terjadwal atau forum LMS; mengacu pada data sekunder BPKP dan pedoman BPKP untuk memvalidasi IKU yang ditetapkan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tahap pengembangan	• Mekanisme tindak lanjut temuan pengawasan dalam kerangka SPIP; • Prinsip akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pengembangan instrumen digital pengawasan pemerintah daerah; Pustaka: Republik Indonesia (2008); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013); Bovaird & Löffler (2016).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		aksesibilitas, keandalan data, dan kesesuaian dengan regulasi pengawasan yang berlaku • Mendokumentasikan keputusan desain secara transparan dengan mencantumkan sumber data, asumsi teknis, dan keterbatasan prototipe sebagai bentuk integritas akademik dan profesional	Blueprint atau Prototipe Instrumen Pengawasan Berbasis TI: dokumen spesifikasi teknis lengkap (800-1.200 kata narasi teknis) disertai tampilan antarmuka prototipe minimal tiga layar di Canva atau Figma, tabel IKU (minimal lima indikator), dan flowchart mekanisme tindak lanjut temuan; dikumpulkan sebagai satu file PDF via LMS UNISAN	Tugas: Melanjutkan dan menyempurnakan rancangan arsitektur konseptual dari Minggu 13, setiap tim mengembangkan blueprint atau prototipe lengkap instrumen pengawasan berbasis TI yang dipilih (e-audit, dashboard kinerja, atau sistem pelaporan pengaduan daring). Blueprint harus memuat spesifikasi teknis antarmuka minimal tiga layar utama, tabel IKU minimal lima indikator yang terukur dan selaras dengan SPIP, flowchart mekanisme tindak lanjut temuan pengawasan, dan narasi teknis yang menjelaskan keputusan desain secara transparan. Tim wajib mencantumkan pernyataan penggunaan Generative AI jika digunakan, serta memverifikasi semua referensi teknis terhadap sumber primer (pedoman	(develop) pada siklus proyek instrumen pengawasan; tim menyempurnakan arsitektur konseptual Minggu 13 menjadi blueprint operasional lengkap dengan spesifikasi teknis, mempraktikkan nilai Creativity melalui inovasi desain dan Adaptability dalam menyesuaikan fitur dengan keterbatasan infrastruktur digital Kawasan Timur Indonesia Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				BPKP, PP 60/2008, atau laporan BPK) sesuai Pedoman Etis Penggunaan Generative AI UNISAN. Deliverable: Satu file PDF yang diunggah ke LMS UNISAN berisi: (1) dokumen spesifikasi teknis blueprint 800-1.200 kata narasi teknis, (2) minimal tiga tangkapan layar atau ekspor tampilan antarmuka prototipe dari Canva atau Figma dengan anotasi fungsi tiap elemen, (3) tabel IKU instrumen pengawasan (minimal lima indikator beserta metode pengukuran dan target capaian), dan (4) flowchart mekanisme tindak lanjut temuan; batas pengumpulan sebelum sesi demonstrasi luring Minggu 14			
15	Sub-CPMK10: Mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan pemerintahan	Mahasiswa mampu: Menyusun rekomendasi kebijakan penguatan sistem	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memimpin dan memfasilitasi forum simulasi sidang kebijakan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan makalah rekomendasi	Bahan Kajian: Rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dalam forum simulasi sidang kebijakan dengan menampilkan argumentasi berbasis bukti, sikap tanggung jawab profesional, dan etika pemerintahan yang konsisten.	pengawasan pemerintahan yang berbasis bukti empiris dan regulasi, mencakup identifikasi masalah, alternatif kebijakan, dan justifikasi pilihan rekomendasi • Mempresentasikan rekomendasi kebijakan secara sistematis dalam forum simulasi sidang kebijakan dengan struktur argumen yang logis, data yang terverifikasi, dan visualisasi yang komunikatif • Mempertahankan rekomendasi kebijakan dari pertanyaan dan sanggahan panelis (dosen dan rekan) dengan argumentasi berbasis bukti yang konsisten dan etis • Menampilkan sikap tanggung jawab profesional dan etika	Tidak ada tes tertulis; penilaian dilakukan melalui rubrik presentasi sidang kebijakan yang mencakup: (1) ketajaman argumentasi berbasis bukti, (2) kelengkapan dan relevansi rekomendasi kebijakan, (3) kemampuan merespons sanggahan panelis secara rasional dan etis, dan (4) kualitas materi presentasi visual Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas partisipasi sebagai panelis untuk tim lain: ketepatan dan relevansi pertanyaan atau sanggahan yang diajukan, sikap	di ruang kelas yang ditata layaknya ruang sidang; setiap tim tampil selama 15 menit (10 menit presentasi dan 5 menit sesi sanggahan dari panelis); dosen bertindak sebagai ketua panelis dan menunjuk dua mahasiswa dari tim lain sebagai panelis tamu per sesi; di akhir seluruh sesi, dosen menyampaikan umpan balik integratif selama 20 menit yang menghubungkan rekomendasi tiap tim dengan kerangka kebijakan pengawasan nasional (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan rekomendasi kebijakan secara langsung di depan forum menggunakan materi yang telah disiapkan; mempertahankan argumen dari sanggahan panelis;	kebijakan dan format simulasi sidang kebijakan di LMS UNISAN; membagikan rubrik penilaian presentasi dan rubrik penilaian peran panelis kepada seluruh mahasiswa; membuka sesi konsultasi daring (Google Meet, 30 menit) untuk mendampingi tim menyempurnakan argumen rekomendasi sebelum hari sidang (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh panduan dan rubrik dari LMS; secara tim menyusun makalah rekomendasi kebijakan di Google Docs dan menyiapkan materi presentasi di Google Slides; mengintegrasikan temuan analisis dan prototipe instrumen dari Minggu 13-14 ke dalam narasi kebijakan yang	pemerintahan: metodologi penyusunan dan standar argumentasi berbasis bukti; • Integrasi instrumen pengawasan berbasis TI ke dalam kebijakan tata kelola pemerintahan daerah; • Etika pemerintahan dan tanggung jawab profesional dalam advokasi kebijakan pengawasan; • Strategi nasional pencegahan korupsi dan penguatan pengawasan sebagai landasan rekomendasi kebijakan; Pustaka: Bovaird & Löffler (2016); Robinson (2015); Sulistiyani (2011); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Komisi Pemberantasan Korupsi (2020);	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintahan yang konsisten selama forum simulasi sidang kebijakan, termasuk ketepatan waktu, bahasa akademik yang santun, dan pengakuan atas keterbatasan analisis • Mengintegrasikan temuan dari Minggu 13 dan 14 (analisis kebutuhan, arsitektur konseptual, dan blueprint instrumen) ke dalam rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan koheren sebagai produk akhir semester	menghargai perspektif berbeda (nilai Harmony), serta konsistensi etika diskusi kebijakan yang mencerminkan nilai Integrity dan Nationalism sebagai landasan etis analisis pengawasan pemerintahan Tugas: Makalah Rekomendasi Kebijakan dan Materi Presentasi Sidang: makalah 1.500-2.000 kata mencakup latar belakang masalah pengawasan, analisis alternatif kebijakan, rekomendasi utama beserta rencana implementasi	mencatat umpan balik sebagai bahan perbaikan makalah final jika diperlukan; tim yang berperan sebagai panelis menyiapkan minimal dua pertanyaan berbasis bukti untuk tim yang disidang MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dalam format simulasi sidang kebijakan (policy hearing simulation): setiap tim memperlakukan hasil analisis dan prototipe instrumen pengawasan yang telah dikembangkan selama Minggu 13-14 sebagai kasus nyata yang diajukan ke forum pembuat kebijakan, melatih nilai Integrity melalui argumentasi etis, Harmony melalui diskusi lintas perspektif, dan Adaptability dalam merespons sanggahan secara konstruktif	komprehensif; mendokumentasikan sumber data sekunder dari portal BPK, BPKP, KPK, dan Ombudsman RI MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning pada fase presentasi dan evaluasi: mahasiswa menyiapkan produk akhir berupa rekomendasi kebijakan terintegrasi yang mencakup seluruh siklus analisis semester, dengan referensi pada nilai Service (rekomendasi berpihak pada kepentingan publik Kawasan Timur Indonesia) dan Nationalism (landasan etis Pancasila dalam advokasi kebijakan pengawasan)	Ombudsman Republik Indonesia (2022).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			singkat, dan daftar pustaka; disertai file presentasi (Google Slides atau PowerPoint, 10-15 slide) yang diunggah ke LMS UNISAN sebelum hari pelaksanaan sidang	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap tim menyusun makalah rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan pemerintahan yang mengintegrasikan seluruh hasil analisis dan pengembangan dari Minggu 13 hingga 14, yaitu analisis kebutuhan instrumen pengawasan, arsitektur konseptual, blueprint prototipe, dan IKU yang telah dikembangkan. Rekomendasi kebijakan harus mencakup: identifikasi masalah pengawasan yang spesifik pada satuan kerja atau daerah yang dikaji, minimal dua alternatif kebijakan dengan analisis kelebihan dan keterbatasan masing-masing, satu rekomendasi utama beserta langkah implementasi yang realistis, dan proyeksi	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dampak bagi penguatan sistem pengawasan di Kawasan Timur Indonesia. Materi presentasi visual disiapkan secara terpisah untuk keperluan sidang. Nilai Integrity ditunjukkan melalui pengakuan keterbatasan analisis secara eksplisit, dan Nationalism diwujudkan melalui penyelarasan rekomendasi dengan semangat tata kelola pemerintahan yang bersih sebagaimana diamanatkan Pancasila. Deliverable: Dua file yang diunggah ke LMS UNISAN sebelum hari sidang: (1) makalah rekomendasi kebijakan dalam format PDF, 1.500-2.000 kata, mencakup latar belakang masalah, analisis alternatif, rekomendasi utama, rencana implementasi singkat, dan daftar pustaka; (2) file presentasi Google Slides atau PowerPoint (10-15			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				slide) yang mencerminkan struktur argumentasi sidang kebijakan secara visual dan komunikatif			
16		Mahasiswa mampu: • Menunjukkan penguasaan seluruh capaian pembelajaran mata kuliah melalui jawaban tertulis yang komprehensif, analitis, dan berbasis regulasi serta konsep pengawasan pemerintahan yang dipelajari sepanjang semester • Mengintegrasikan konsep pengawasan internal, eksternal, kelembagaan, SPIP, dan instrumen berbasis TI dalam analisis kasus atau soal esai yang disajikan pada UAS • Menyampaikan argumentasi tertulis secara sistematis,	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Akhir Semester tertulis (daring via LMS UNISAN atau luring sesuai kebijakan fakultas) yang menguji integrasi seluruh Sub-CPMK semester; kisi-kisi mencakup analisis kasus pengawasan pemerintah daerah, evaluasi efektivitas SPIP, dan penilaian rekomendasi kebijakan berbasis instrumen pengawasan yang dikembangkan;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen hadir di ruang ujian untuk mengawasi pelaksanaan UAS; membagikan lembar soal dan jawaban sesuai tata tertib ujian UNISAN; memastikan kondisi ujian yang tertib dan adil bagi seluruh mahasiswa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UAS secara individual di ruang ujian yang telah ditetapkan dalam durasi waktu yang ditentukan; menuliskan jawaban esai yang mencerminkan kemampuan analisis dan sintesis materi sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan secara	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengonfigurasi soal UAS di LMS UNISAN dengan pengaturan waktu, batas akses, dan opsi antiplagiarisme yang sesuai; memantau proses ujian secara daring dan memastikan ketersediaan teknis platform selama periode ujian berlangsung (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UAS melalui LMS UNISAN dalam batas waktu yang ditetapkan; mengacu pada pemahaman konseptual dan analitis yang dibangun sepanjang semester tanpa membuka	Bahan Kajian: • Integrasi seluruh bahan kajian semester: konsep dasar pengawasan, landasan hukum dan regulasi, tipologi dan kelembagaan pengawasan, good governance dan antikorupsi, SPIP, evaluasi pengendalian internal, matriks kinerja, instrumen pengawasan berbasis TI, dan rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan pemerintahan; Pustaka: Bovaird & Löffler (2016); Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		koheren, dan menggunakan bahasa akademik yang tepat sebagai cerminan kompetensi akhir bidang sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan	penilaian menggunakan rubrik jawaban esai yang mengukur kedalaman analisis, ketepatan konsep, dan kelengkapan argumen Partisipasi kelas & laboratorium: Ketertiban dan kejujuran akademik selama pelaksanaan UAS sesuai tata tertib ujian UNISAN; sikap profesional mencerminkan nilai Integrity sebagai penciri UNISAN Tugas: Tidak ada tugas tambahan pada minggu UAS; mahasiswa	komprehensif MP — Metode Pembelajaran: Asesmen sumatif individual berbasis esai analitis: mahasiswa menjawab pertanyaan esai yang menuntut integrasi konsep pengawasan, regulasi, kelembagaan, SPIP, dan instrumen berbasis TI yang telah dipelajari, sebagai bukti ketercapaian seluruh CPMK mata kuliah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan terstruktur pada minggu UAS. Mahasiswa diharapkan telah menyelesaikan seluruh tugas dan produk dari Minggu 1-15. Pelaksanaan UAS merupakan asesmen sumatif akhir yang mengukur integrasi	referensi kecuali diizinkan secara eksplisit oleh dosen MP — Metode Pembelajaran: Asesmen sumatif individual: ujian esai berbasis kasus yang mengukur integrasi capaian pembelajaran seluruh semester, selaras dengan pendekatan authentic assessment dalam SN-Dikti Pasal 14 dan KPT 2024 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	(2013); Robinson (2015); Sulistiyani (2011); Republik Indonesia (2008); Republik Indonesia (2004); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2021); Komisi Pemberantasan Korupsi (2020); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Ombudsman Republik Indonesia (2022).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menyiapkan diri berdasarkan seluruh materi dan produk yang telah dikembangkan sepanjang Minggu 1-15	pengetahuan, keterampilan analisis, dan sikap profesional yang telah dikembangkan sepanjang semester. Deliverable: Lembar jawaban UAS yang diserahkan kepada pengawas (luring) atau diunggah melalui LMS UNISAN (daring) sesuai mekanisme yang ditetapkan panitia ujian UNISAN			

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri, **P**=Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Kasus	10	
2	Kuis	10	
3	UTS	20	
4	Proyek Instrumen Pengawasan	40	
5	UAS	20	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Kasus	Kuis	UTS	Proyek Instrumen Pengawasan	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	5	4	—	—	9
Sub-CPMK2	—	5	4	—	—	9
Sub-CPMK3	10	—	4	—	—	14
Sub-CPMK4	—	—	4	—	—	4
Sub-CPMK5	—	—	4	—	—	4
Sub-CPMK6	—	—	—	14	4	18
Sub-CPMK7	—	—	—	13	4	17
Sub-CPMK8	—	—	—	13	4	17
Sub-CPMK9	—	—	—	—	4	4
Sub-CPMK10	—	—	—	—	4	4
Bobot Komponen (%)	10	10	20	40	20	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00

65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Merancang dan Mengembangkan Instrumen Penguatan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia — dari Analisis Kasus hingga Rekomendasi Kebijakan Berbasis Teknologi

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pemerintahan*				
KODE	3PBIP307	sks	3	SEMESTER	6
DOSEN PENGAMPU	Balada Raf, S.Sos., M.Si.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) terintegrasi Case-Based Learning (CBL)					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Merancang dan Mengembangkan Instrumen Penguatan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah di Kawasan Timur Indonesia — dari Analisis Kasus hingga Rekomendasi Kebijakan Berbasis Teknologi					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK3: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan celah serta kelemahan pengawasan pada kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi,					

rule of law). Sub-CPMK4: Menganalisis akar masalah dan dampak kelemahan pengawasan pada kasus nyata pemerintahan desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan prinsip antikorupsi, dibuktikan dengan laporan analisis kasus tertulis minimal 2.000 kata. Sub-CPMK6: Mengevaluasi efektivitas implementasi komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan SPIP pada satuan kerja pemerintah daerah, serta merumuskan temuan evaluatif dalam format matriks kinerja pengendalian yang terukur. Sub-CPMK7: Menganalisis kebutuhan dan merancang arsitektur konseptual instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi (e-audit, dashboard kinerja, atau sistem pelaporan pengaduan daring) yang sesuai dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia. Sub-CPMK8: Mengembangkan prototipe atau blueprint lengkap instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi yang akuntabel dan adaptif, dilengkapi spesifikasi teknis, indikator kinerja utama (IKU), dan mekanisme tindak lanjut temuan. Sub-CPMK9: Merumuskan alternatif kebijakan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan beserta analisis kelayakan dan strategi implementasinya, dengan mempertimbangkan nilai integritas, kepentingan publik, dan nilai-nilai Pancasila. Sub-CPMK10: Mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan penguatan sistem pengawasan pemerintahan dalam forum simulasi sidang kebijakan dengan menampilkan argumentasi berbasis bukti, sikap tanggung jawab profesional, dan etika pemerintahan yang konsisten.
DISKRIPSI TUGAS Mahasiswa secara berkelompok (3–4 orang) memilih satu satuan kerja pemerintah daerah (OPD/desa) di Kawasan Timur Indonesia sebagai objek studi. Mereka menganalisis kelemahan pengawasan menggunakan kerangka good governance dan prinsip antikorupsi, mengevaluasi efektivitas implementasi SPIP (PP 60/2008), merancang arsitektur instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi yang adaptif terhadap kapasitas kelembagaan daerah, lalu merumuskan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan penguatan pengawasan dalam forum simulasi sidang kebijakan. Proyek ini mengintegrasikan nilai integritas (Integrity), kreativitas (Creativity), keberpihakan pada kepentingan publik (Service), dan adaptabilitas terhadap konteks lokal (Adaptability) sebagai penciri ICHSA-N, sekaligus membangun jiwa technopreneurship dalam penerapan inovasi tata kelola pemerintahan.
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus) Analisis kasus nyata kelemahan pengawasan pada OPD/desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan empat prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law) dan prinsip antikorupsi Evaluasi efektivitas implementasi komponen SPIP (PP 60/2008): lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan, dituangkan dalam matriks kinerja pengendalian Perancangan arsitektur konseptual instrumen pengawasan berbasis TI (pilih salah satu: e-audit, dashboard kinerja berbasis open data, atau sistem pelaporan pengaduan daring) yang sesuai kapasitas kelembagaan daerah Pengembangan prototipe/blueprint lengkap instrumen pengawasan berbasis TI, mencakup spesifikasi teknis, IKU, dan mekanisme tindak lanjut temuan Perumusan alternatif kebijakan penguatan pengawasan beserta analisis kelayakan (regulatif, kelembagaan, fiskal) dan strategi implementasi yang mempertimbangkan nilai integritas, kepentingan publik, dan nilai-nilai Pancasila Presentasi dan pembelaan rekomendasi kebijakan dalam forum simulasi sidang kebijakan berbasis argumentasi bukti
LANGKAH Pengerjaan Tugas

Langkah 1 (Mg 1–2) — Orientasi & Pembentukan Kelompok: Membentuk kelompok (3–4 mahasiswa), memilih objek studi OPD/desa di Kawasan Timur Indonesia, memetakan hierarki regulasi pengawasan yang berlaku (UU, PP, Perpres), dan menyusun proposal singkat (maks. 500 kata) berisi latar belakang, rumusan masalah, dan justifikasi pemilihan objek studi.

Langkah 2 (Mg 3–4) — Pemetaan Kelembagaan & Kerangka Hukum: Membandingkan peran dan kewenangan lembaga pengawasan yang relevan dengan objek studi (BPK, BPKP, Inspektorat Daerah, Ombudsman), membuat matriks koordinasi kelembagaan, dan mengidentifikasi regulasi teknis yang berlaku pada objek studi.

Langkah 3 (Mg 5–6) — Analisis Kasus Kelemahan Pengawasan: Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan celah pengawasan menggunakan kerangka good governance; menyusun laporan analisis kasus tertulis minimal 2.000 kata yang menguraikan akar masalah, dampak, dan keterkaitan dengan prinsip antikorupsi — dilengkapi bukti dokumen/data sekunder yang dapat diverifikasi.

Langkah 4 (Mg 7–8) — Evaluasi SPIP & Matriks Kinerja Pengendalian: Mengevaluasi efektivitas kelima komponen SPIP pada objek studi berdasarkan PP 60/2008; merumuskan temuan evaluatif dalam format matriks kinerja pengendalian (kolom: komponen SPIP, kondisi ideal, kondisi aktual, gap, rekomendasi awal).

Langkah 5 (Mg 9–10) — Perancangan Arsitektur Instrumen Berbasis TI: Menganalisis kebutuhan teknologi informasi pengawasan pada objek studi; merancang arsitektur konseptual instrumen (e-audit/dashboard kinerja/sistem pengaduan daring) dalam bentuk diagram alur sistem, use-case diagram, dan justifikasi kesesuaian kapasitas kelembagaan daerah.

Langkah 6 (Mg 11–12) — Pengembangan Prototipe/Blueprint: Mengembangkan prototipe atau blueprint lengkap instrumen berbasis TI, mencakup: wireframe/mockup antarmuka, spesifikasi teknis modul utama, daftar IKU pengawasan yang terukur, dan SOP mekanisme tindak lanjut temuan — nilai kreativitas (Creativity) dan technopreneurship dikedepankan dalam desain solusi inovatif.

Langkah 7 (Mg 13–14) — Perumusan Kebijakan & Penyusunan Laporan Akhir: Merumuskan minimal dua alternatif kebijakan penguatan pengawasan, menganalisis kelayakannya (regulatif, kelembagaan, fiskal), menyusun strategi implementasi berbasis nilai integritas dan Pancasila, serta mengintegrasikan seluruh komponen ke dalam laporan akhir komprehensif.

Langkah 8 (Mg 15) — Simulasi Sidang Kebijakan (Final Presentation): Mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan di depan panel penguji (simulasi sidang kebijakan), menampilkan argumentasi berbasis bukti, sikap tanggung jawab profesional, dan etika pemerintahan yang konsisten — nilai Harmony dan Service tercermin dalam cara merespons pertanyaan panel dan keberpihakan pada publik.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Proposal singkat objek studi (maks. 500 kata, dikumpul Mg 2); 2) Laporan analisis kasus tertulis minimal 2.000 kata beserta matriks koordinasi kelembagaan (dikumpul Mg 6); 3) Matriks kinerja pengendalian SPIP (format tabel terstandar, dikumpul Mg 8); 4) Dokumen arsitektur konseptual instrumen berbasis TI — diagram alur sistem + use-case diagram + narasi justifikasi (dikumpul Mg 10); 5) Prototipe/Blueprint instrumen berbasis TI — wireframe/mockup + spesifikasi teknis + daftar IKU + SOP tindak lanjut temuan (dikumpul Mg 12); 6) Laporan akhir komprehensif (min. 5.000 kata, format A4, spasi 1,5, margin 3-3-3-3 cm) yang mengintegrasikan analisis kasus, evaluasi SPIP, desain instrumen TI, dan rekomendasi kebijakan beserta analisis kelayakan (dikumpul Mg 14); 7) Slide presentasi sidang kebijakan (15–20 slide) dan rekaman video pitching/sidang (dikumpul Mg 15).

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN

a. Analisis Kasus & Pemetaan Kelemahan Pengawasan (bobot 20%). Dinilai dari ketajaman identifikasi dan klasifikasi celah pengawasan menggunakan kerangka good governance dan prinsip antikorupsi, kedalaman analisis akar masalah dan dampak, serta kualitas argumentasi berbasis bukti dokumen/data sekunder yang dapat diverifikasi pada laporan analisis kasus minimal 2.000 kata.

b. Evaluasi SPIP & Matriks Kinerja Pengendalian (bobot 20%). Dinilai dari kelengkapan evaluasi kelima komponen SPIP sesuai PP 60/2008, akurasi identifikasi gap antara kondisi ideal dan aktual, serta kejelasan dan keterukuran temuan evaluatif yang dituangkan dalam format matriks kinerja pengendalian terstandar.

c. Rancangan Arsitektur & Prototipe/Blueprint Instrumen Berbasis TI (bobot 25%). Dinilai dari kesesuaian arsitektur konseptual dengan kebutuhan pengawasan objek studi, kelengkapan prototipe/blueprint (wireframe/mockup, spesifikasi teknis, IKU yang terukur, SOP tindak lanjut), serta tingkat inovasi dan adaptabilitas desain terhadap kapasitas kelembagaan daerah di Kawasan Timur Indonesia.

d. Rumusan Rekomendasi Kebijakan & Analisis Kelayakan (bobot 20%). Dinilai dari kualitas perumusan minimal dua alternatif kebijakan, kelengkapan analisis kelayakan (regulatif, kelembagaan, fiskal), koherensi strategi implementasi, serta konsistensi penerapan nilai integritas, kepentingan publik, dan nilai-nilai Pancasila dalam argumentasi kebijakan.

e. Presentasi Sidang Kebijakan & Pembelaan Argumentasi (bobot 15%). Dinilai dari kemampuan menyajikan rekomendasi secara sistematis dan berbasis bukti, kualitas respons terhadap pertanyaan

panel penguji, konsistensi sikap tanggung jawab profesional dan etika pemerintahan, serta kualitas visual slide dan rekaman sidang.

JADWAL PELAKSANAAN

Mg 1–2: Orientasi proyek, pembentukan kelompok, pemilihan objek studi OPD/desa di KTI, dan pengumpulan proposal singkat
 Mg 3–4: Pemetaan kelembagaan pengawasan dan kerangka hukum; penyusunan matriks koordinasi kelembagaan
 Mg 5–6: Analisis kasus kelemahan pengawasan; pengumpulan laporan analisis kasus minimal 2.000 kata
 Mg 7–8: Evaluasi efektivitas SPIP; pengumpulan matriks kinerja pengendalian
 Mg 9–10: Perancangan arsitektur konseptual instrumen berbasis TI; pengumpulan dokumen arsitektur + diagram
 Mg 11–12: Pengembangan prototipe/blueprint instrumen berbasis TI; pengumpulan prototipe/blueprint lengkap
 Mg 13–14: Perumusan rekomendasi kebijakan, analisis kelayakan, dan penyusunan laporan akhir komprehensif; pengumpulan laporan akhir
 Mg 15: Simulasi sidang kebijakan (final presentation & pembelaan rekomendasi); pengumpulan slide + rekaman video sidang

LAIN-LAIN

Final project dikerjakan secara berkelompok (3–4 mahasiswa per kelompok dengan komposisi heterogen), namun setiap anggota wajib melampirkan lembar kontribusi individu yang ditandatangani seluruh anggota — mendeskripsikan bagian spesifik yang dikerjakan masing-masing sebagai bentuk akuntabilitas (Integrity); kelompok yang tidak menyertakan lembar kontribusi dikenai pengurangan 10 poin dari nilai akhir. Setiap deliverable antara (proposal, laporan analisis kasus, matriks SPIP, dokumen arsitektur TI, prototipe/blueprint) dikumpulkan melalui LMS UNISAN sesuai batas waktu terjadwal; keterlambatan pengumpulan dikenai penalti 5 poin per hari kerja keterlambatan (maks. pengurangan 15 poin) tanpa pengecualian, kecuali kondisi force majeure yang dibuktikan dengan surat resmi. Objek studi wajib berupa OPD atau pemerintah desa yang berlokasi di wilayah Kawasan Timur Indonesia, serta tidak boleh sama antar kelompok dalam satu kelas — konfirmasi objek studi dilakukan pada Mg 2 melalui persetujuan dosen pengampu guna menghindari duplikasi. Data yang digunakan harus bersumber dari dokumen publik yang dapat diverifikasi (LKPD, laporan hasil pemeriksaan BPK, laporan Ombudsman, atau dokumen perencanaan daerah); penggunaan data fiktif atau tidak berdasar menyebabkan komponen terkait tidak dapat dinilai. Presentasi sidang kebijakan pada Mg 15 bersifat wajib hadir; ketidakhadiran tanpa alasan yang sah mengakibatkan nilai komponen presentasi (15%) menjadi nol.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. BPKP.
 Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Sistem Integritas Nasional: Kerangka Kerja Pencegahan Korupsi. KPK.
 Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Andi.
 Mulyadi. (2016). Sistem Pengendalian Manajemen. Salemba Empat.
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik.
 Siagian, S. P. (2014). Manajemen Strategik. Bumi Aksara.
 Sulistiyono, A. (2019). Pengawasan Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik. Gramedia Pustaka Utama.
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
 Widodo, J. (2020). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media.

5.1 Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Keaktifan	Aktif & relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
2	Kualitas kontribusi	Ide bernas & menambah wawasan	Ide baik	Ide umum	Tidak berbobot
3	Menghargai pendapat	Menyimak & menanggapi santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi/abai
4	Tanggung jawab tugas	Selalu siap & tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
5	Etika & sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

5.2 Kuis

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 Proyek Instrumen Pengawasan

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Proyek Instrumen Pengawasan			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi

3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

5.5 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.